

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ali Zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, Jakarta: Komisi Yudisial.
- Laode M. Syarif & Andri W. Wibisana (Eds.), 2014, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta: USAID & The Asia Foundation.
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Mochtar kusumaatmaja, 2002, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Otje Salman dan Eddy Damian (Ed.), 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- RM. Gatot Soemartono, 1991, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru.
- Soejono Dirdjosisworo, 1983, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryati Hartono, 2006, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suparto Wijoyo, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

#### **Jurnal**

- Azmi Fendri, Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Edi Kristianta Tarigan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 1 Januari 2019.
- Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita, Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak, *Jurnal Alami*, Vol. 12, No. 1, 2013.
- Riki, Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan di Kawasan Pertambangan Morowali ditinjau dari Hukum Lingkungan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Suwari Akhmaddhian, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Studi di Kabupaten Kuningan)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September 2013.

## Tesis

Cicilia Sulastri, 2003, *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Kasus: Penegakan Hukum Pidana Terhadap PT. Menara Jaya dan UD. Kurnia di Jakarta Timur)*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Endang Sri Lestari, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Kartono Dwi Saputro, 2019, *Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku Papua dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Miftahudin, 2019, *Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan terhadap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melakukan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Nunung Prihatining Tias, 2009, *Efektivitas Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus*, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Ursula Diatri Wuland, 2015, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mediasi*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

## Sumber Online

Agustinus Karlo Lumban Raja & Maryo Saputra Sanuddin, 2018, "Catatan Kritis: Ancaman Ekspansi Kelapa Sawit di Papua Terhadap Keberadaan Masyarakat Adat". Dapat diakses pada laman: <https://sawitwatch.or.id/2018/01/catatan-kritis-ancaman-ekspansi-kelapa-sawit-di-papua-terhadap-keberadaan-masyarakat-adat/>

Baku Mutu Air, lihat <https://hukumlingkungan.or.id/2020/02/11/baku-mutu-air/>

<http://jasoilPapua.blogspot.com/2014/02/pahitnya-sawit-baru-terasa-di-manokwari.html>

<https://teropongnews.com/masyarakat-distrik-sidey-keluhkan-pembuangan-limbah-pt%20medco/>

<https://panahpapua.or.id/berita/rayu-capitol-lemahkan-penegak-hukum-di-papua>

<https://jubi.co.id/yayasan-pusaka-temukan-42-pelanggaran-ham-di-papua/>

[http://sipp.pn-manokwari.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-manokwari.go.id/index.php/detil_perkara)

<https://suaramandiri.co/2020/12/17/pemberian-sanksi-kepada-salah-satu-perusahaan-di-warpramasi-oleh-gakkum-klhk-tanpa-rekomendasi-kepada-dlh-manokwari/>

Kabar Daerah Papua Barat, Bagaimana Pengelolaan Limbah PT. Medcopapua Hijau Selaras (The Capitol Group)? Begini klarifikasi selengkapnya, lihat

<https://papuabarat.kabardaerah.com/2020/07/24/bagaimana-pengelolaan-limbah-pt-medcopapua-hijau-selaras-the-capitol-group-begini-klarifikasi-selengkapnya/>

Sayyidatihiyaa Afra G. Raseukiy, Sistem Hukum Nasional Sebagai Peningat Bahwa Hukum Bukan Alat Penguasa, lihat <https://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasional-sebagai-peningat-bahwa-hukum-bukan-alat-penguasa/> Mongabay,

<https://www.mongabay.co.id/2014/03/08/kala-hutan-terbabat-berganti-sawit-banjir-pun-terjang-manokwari/>

## **Sumber Lain**

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Medcopapua Hijau Selaras The Capitol Group Kabupaten Manokwari – Provinsi Papua Barat Distrik Sidey – Desa Sidey Jaya SP IX, Tahun 2019.

Voigt. S. When a Gudge likely to be a corrupt? Global Corruption Report. Transparency International, 2007.

## **Instrumen Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya\

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup